

Received: December 2025

Accepted: December 2025

Published: May 2026

Muhammadiyah dan NU dalam Kanvas Sejarah Dua Sayap Modernitas Islam Indonesia

Zahratunnisa, Azmi Endah, Nanda Luvia

Universitas Islam Negeri Profesor KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Islam Negeri Profesor KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Islam Negeri Profesor KH.

Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: 234110402144@mhs.uinsaizu.ac.id, 234110402107@mhs.uinsaizu.ac.id,
234110402127@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract

Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) are the two largest Islamic organizations in Indonesia that form the “two wings” of modernity in Islam Nusantara. Muhammadiyah, founded by KH Ahmad Dahlan in 1912, emphasizes the purification of teachings through modern education, Health, and urban da’wah. NU, born in 1926 under KH Hasyim Asy’ari, preserved the pesantren tradition while adapting to colonialism. Both became the canvas of the history of the Islamic movement from independence to the 1998 Reformation, combining reform and conservation. This study aims to analyze their dialectical role in building an inclusive, tolerant, and progressive Islamic identity amidst socio-political dynamics. Analytical and descriptive qualitative methods were applied, analyzing journals related to Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. Key findings: Muhammadiyah modernized urban areas through thousands of schools and hospitals; NU strengthened rural areas through kyai and pesantren. Collaboration was evident in the 1945 Jakarta Charter and the 1984 Congress, producing moderate Islam that rejects radicalism, contributing 60% of national political cadres post-New Order. Both create harmony between reform and tradition: Recommendations to strengthen dialogue between factions in the face of contemporary digitalization of da’wah.

Keywords: Muhammadiyah, Islamic Modernization, NU

Abstrak

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dua organisasi Islam terbesar Indonesia yang membentuk “dua sayap” modernitas Islam Nusantara. Muhammadiyah, didirikan KH Ahmad Dahlan tahun 1912, menekankan purifikasi ajaran melalui pendidikan modern, kesehatan, dan dakwah urban. NU, lahir 1926 di bawah KH Hasyim Asy’ari, mempertahankan tradisi pesantren sambil adaptif terhadap kolonialisme. Keduanya menjadi kanvas sejarah pergerakan

Islam dari kemerdekaan hingga Reformasi 1998, menggabungkan reformasi dan konservasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dialektis mereka dalam membangun identitas Islam inklusif, toleran, dan progresif di tengah dinamika politik-sosial. Metode kualitatif analitis dan deskriptif diterapkan, menganalisis urnal yang berkeaitan dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Hasil utama: Muhammadiyah modernisasi urban via ribuan sekolah dan rumah sakit; NU perkuat rural melalui kyai dan pesantren. Kolaborasi terlihat di Piagam Jakarta 1945 dan Mukhtamar 1984, hasilkan Islam moderat tolak radikalisme, kontribusi 60% kader politik nasional pasca-Orde Baru. Keduanya ciptakan harmoni reformasi-tradisi; rekomendasi perkuat dialog antar-sayap hadapi digitalisasi dakwah kontemporer.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Modernisasi Islam, NU

Pendahuluan

Abduh memberikan penekanan tentang pentingnya ijtihad dalam beragama untuk menghindari sikap jumud. Melalui majalah Al Manar, Abduh menyebarkan gagasan modernisasi pemikiran keagamaan yang salah satu seruannya adalah ajakan beradaptasi dengan modernisasi yang sedang berkembang di Eropa. Majalah Al Manar menjadi salah satu media penting yang menyuarakan modernisasi pemikiran agama. Implikasi langsung dari modernisasi agama adalah modernisasi lembaga-lembaga pendidikan agama. Pada titik inilah pertemuan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memainkan peran penting dalam pembaruan pemikiran Islam di tanah air. Kedua organisasi ini lahir dari konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda, namun keduanya berkontribusi signifikan dalam perkembangan Islam di Indonesia (Hasballah & Suyanta, 2025).

Gerakan pembaharuan islam dimulai sejak abad ke-20 dengan misi untuk menegakkan agama Islam demi kemuliaanislam dengan idealita dan kejayaan umat sebagai representasi secara konkrit dengan menciptakan organisasiatau gerakan islam sebagai alat perjuangannya. Salah satu contoh yang signifikan dalam sejarah gerakan pembaharuan Islam di Indonesia adalah kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang diakui sebagai "Bapak Pembaharuan Islam" di Indonesia. Lahir dengan nama Muhammad Darwis pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta, Dahlan menunjukkan jiwa kritis sejak kecil dan merasa prihatin terhadap perilaku masyarakat Muslim di Indonesia yang masih mencampuradukkan adat-istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam Selain gerakan Muhammadiyah, peran penting dalam sejarah pembaharuan Islam di Indonesia juga dimiliki oleh aliran teologi

Asy'ariyyah. Asy'ariyyah merupakan salah satu aliran teologi yang berkembang luas di wilayah Nusantara, dan organisasi Nahdlatul Ulama' menjadikan teologi ini sebagai salah satu pijakan utama dalam akidahnya. Dinamika perkembangan pemikiran Asy'ariyyah di Indonesia tidak hanya terbatas pada dua generasi awal, melainkan juga melibatkan tokoh pemikir lainnya seperti Syaikh Nawawi Banten, yang diakui sebagai "Bapak Intelektual Pesantren" di Nusantara. Karya tulis Nawawi al-Bantani, seperti "Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid", menunjukkan kontribusi pentingnya dalam bidang kalam dan teologi Islam di Indonesia (Ilham et al., 2024).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena sifat kajiannya yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap permasalahan, perilaku, dan proses yang terjadi dalam konteks sosial-keagamaan serta budaya dalam gerakan dakwah dan pendidikan kedua organisasi tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Nahdlatul Ulama (NU), yang secara literal bermakna kebangkitan kaum ulama, merupakan organisasi keislaman yang

dibentuk oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah, di kawasan Kertopaten, Surabaya. Untuk memahami NU secara komprehensif sebagai sebuah organisasi keagamaan, peninjauan tidak cukup dilakukan hanya dari aspek formal sejak berdirinya sebagai jam'iyah. Sebelum dilembagakan secara organisasi, NU telah lebih dahulu hadir dalam wujud jama'ah atau komunitas keagamaan yang terikat oleh praktik sosial dan aktivitas keislaman yang kuat serta memiliki karakter tersendiri. Kemunculan NU juga tidak terlepas dari konteks perkembangan pemikiran keagamaan dan situasi politik dunia Islam pada masa itu. Pada tahun 1924, wilayah Arab Saudi mengalami perubahan besar ketika kekuasaan Syarif Husein, Raja Hijaz yang berpaham Sunni, berhasil digantikan oleh Abdul Aziz bin Saud yang membawa paham Wahabi. Peristiwa tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan ulama tradisional, terutama terkait keberlanjutan ajaran dan praktik keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah. Pada periode yang relatif bersamaan, di Indonesia, K.H. Wahab Chasbullah mulai mengemukakan gagasan kepada K.H. Hasyim Asy'ari mengenai perlunya dibentuk sebuah organisasi sebagai wadah perjuangan dan konsolidasi para ulama. Ide tersebut baru dapat diwujudkan dua tahun kemudian, yakni pada tahun 1926, melalui pertemuan para ulama yang

kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama secara resmi. K.H. Hasyim Asy'ari, yang lahir pada 10 Maret 1871 di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, dikenal sebagai ulama besar dan tokoh agama yang sangat dihormati serta memiliki pengaruh luas dalam perkembangan kehidupan keislaman di Indonesia (Fyroza Mustika Akhlis, 2024).

Sejarah berdirinya Nahdlatu ulama

Nahdlatul Ulama (NU), yang secara harfiah berarti “kebangkitan para ulama”, merupakan organisasi keagamaan yang didirikan oleh para ulama pada 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H, bertempat di Kampung Kertopaten, Surabaya. Untuk memahami NU secara utuh sebagai organisasi keagamaan, tidak cukup jika hanya melihatnya dari sisi formal sejak pendiriannya sebagai sebuah jam'iyah. Jauh sebelum itu, NU telah hadir dalam bentuk jama'ah atau komunitas keagamaan yang memiliki ikatan kuat melalui aktivitas sosial dan keagamaan, serta memiliki ciri khas tersendiri. Lahirnya NU tidak dapat dipisahkan dari dinamika pemikiran keagamaan dan perkembangan politik dunia Islam pada masa tersebut. Pada tahun 1924, di kawasan Arab Saudi terjadi gelombang pembaruan setelah Syarif Husein, Raja Hijaz yang berhaluan Sunni, berhasil ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang menganut paham Wahabi. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ulama tradisional,

terutama terkait keberlangsungan praktik keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah. Pada waktu yang hampir bersamaan, di Indonesia, K.H. Wahab Chasbullah mulai menyampaikan gagasan kepada K.H. Hasyim Asy'ari mengenai pentingnya mendirikan sebuah organisasi yang dapat menjadi wadah perjuangan para ulama. Gagasan tersebut baru terealisasi dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1926, ketika para ulama berhasil dikumpulkan untuk secara resmi mendirikan Nahdlatul Ulama. K.H. Hasyim Asy'ari sendiri lahir pada 10 Maret 1871 di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar dan pemimpin agama yang sangat disegani serta memiliki pengaruh besar dalam kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia. K.H. Hasyim Asy'ari tumbuh dalam lingkungan pesantren tradisional Jawa, di mana ia mendalami ilmu agama Islam dan menjadi seorang ulama yang memahami Islam dengan mendalam. Nahdlatul Ulama sendiri adalah sebuah organisasi berbasis agama, memiliki pengaruh Islam yang didirikan dan dimulai oleh parakiai yang memiliki ideologi kepada Ahlussunah Wal Jama'ah yang dinisiasi untuk tempat melakukan kegiatan dalam kesatuan dan menyatukan arah gerak dalam upaya arahan pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan dan juga untuk melakukan kegiatan keislaman dan ajarannya dengan mengacu

kepada satu dari beberapa banyak imam mazhab baik itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i ataupun Imam Hambali. Dan juga berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat islam. Sehingga diharapkan bahwa Masyarakat NU akan berkehidupan adil, Makmur dan Sejahtera. NU konsisten menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, bergerak untuk membangun peradaban yang madani (beradab) dengan landasan Islam Aswaja dan semangat kebangsaan Indonesia, fokus pada kesejahteraan umat dan bangsa (M. Ali Imron et al., 2024).

Dinamika Hubungan

Komitmen Kebangsaan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Umat Ideologi persamaan sering kali ditemukan pada komitmen kebangsaan yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, serta menjunjung prinsip musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial demi kesejahteraan seluruh rakyat. Pendidikan nilai-nilai kebangsaan dan agama serta upaya kesejahteraan umat menjadi titik temu utama terkait cita-cita bersama dalam keberagaman bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dan program bela negara memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat yang majemuk. ada titik temu fundamental yang menyatukan berbagai kelompok, yaitu:

- a. **Komitmen Kebangsaan:** Semua kelompok Islam, baik modernis maupun tradisional, sama-sama berkomitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menganggap menjaga persatuan bangsa adalah bagian dari ajaran Islam tentang ukhuwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Contoh: NU dengan konsep hubbullah wathan minal iman dan Muhammadiyah dengan semangat Islam Berkemajuan.
- b. **Pendidikan:** Kedua kelompok sama-sama menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pemberdayaan umat. NU: melalui pesantren dan madrasah tradisional. Muhammadiyah: melalui sekolah modern dan perguruan tinggi Islam. Tujuan keduanya sama: membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
- c. **Kesejahteraan Umat:** Keduanya memiliki visi meningkatkan taraf hidup umat melalui dakwah sosial, ekonomi, dan kesehatan. Misalnya, pendirian rumah sakit, koperasi, dan lembaga sosial berbasis keumatan. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki komitmen kuat terhadap kebangsaan, peningkatan pendidikan, dan kesejahteraan umat, yang menjadi titik temu utama dalam dinamika hubungan mereka. Kedua organisasi ini

menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan patriotisme melalui jaringan pendidikan serta dakwah yang luas, sehingga memperkuat persatuan bangsa. Kolaborasi ini menciptakan modal sosial yang mendukung pendidikan politik dan sosial bagi masyarakat. Perbedaan utama terletak pada metodologi penetapan hukum Islam (fikih) dan penerimaan praktik keagamaan lokal seperti tahlilan serta ziarah kubur. NU memandang tahlilan sebagai amalan yang tertanam pada budaya Islam, mempererat silaturahmi, dan memiliki dasar syariat, sementara Muhammadiyah menolaknya karena dianggap bid'ah tanpa tuntunan teks keagamaan yang jelas. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan tradisional inklusif NU versus purifikasi syariat Muhammadiyah (Yola, 2024)

Peran dalam Revolusi dan Kemerdekaan

1. Resolusi Jihad NU (Nahdlatul Ulama)

Latar Belakang: Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia melalui NICA. Situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan ulama dan santri. **Isi Resolusi Jihad:** Pada 22 Oktober 1945, KH. Hasyim Asy'ari (pendiri NU) mengeluarkan Resolusi Jihad yang berisi fatwa wajib bagi umat Islam untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah.

Dampak: Resolusi ini membakar semangat rakyat Surabaya dan berbagai daerah untuk melawan Belanda, yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945 (Hari Pahlawan). **Makna Historis:** NU menegaskan bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah bagian dari kewajiban agama.

2. Peran Muhammadiyah

Konteks: Sebagai organisasi pembaruan Islam, Muhammadiyah turut aktif dalam perjuangan kebangsaan dengan menanamkan pendidikan, kesadaran nasional, dan semangat kemerdekaan. **Kontribusi:** Membentuk Barisan Hizbullah dan Sabilillah sebagai kekuatan militer Islam. Mendidik kader bangsa seperti Ki Bagus Hadikusumo, yang kemudian berperan penting dalam BPUPKI dan PPKI. Menggalakkan pendidikan modern dan amal usaha untuk memperkuat masyarakat Indonesia secara sosial, ekonomi, dan intelektual.

Makna: Muhammadiyah menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan sekadar politik, tetapi juga pembebasan umat dari kebodohan dan kemiskinan. Organisasi kedua memainkan peran krusial dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dengan NU mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 dan Muhammadiyah berkontribusi melalui pendidikan nasionalis. Mereka sama-sama menerima Pancasila sebagai dasar negara,

menyebarkan semangat patriotisme melalui khutbah dan pendidikan. Pendirian sekolah serta pesantren oleh keduanya membentuk generasi sadar kemerdekaan.

Masa Orde Lama dan Orde Baru

Hubungan NU dan Muhammadiyah dengan kekuasaan bervariasi; di Orde Lama, NU dekat dengan Sukarno dan mendapat jatah kekuasaan, sementara di Orde Baru, Muhammadiyah lebih diuntungkan oleh Soeharto. NU sempat mendukung pengganyangan PKI awal Orde Baru, namun kemudian berposisi karena diabaikan, menggunakan pendekatan politik dan budaya. Keduanya tetap berperan dalam pembangunan nasional melalui pendidikan dan sosial

Era Reformasi

Pada masa Orde Lama, NU berperan aktif secara politis dan cenderung terlibat dalam stabilitas maupun oposisi terhadap pemerintah. Pada masa Orde Baru, NU mendukung legitimasi Soeharto setelah kecewa terhadap Soekarno, membantu mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Peran dalam Pembangunan Nasional dan Tantangan Ideologi Kedua organisasi mendukung pembangunan nasional melalui program pendidikan, sosial, dan dakwah. Mereka menghadapi tantangan ideologi dalam menyeimbangkan nilai agama dengan modernitas dan nasionalisme dalam

konteks pembangunan (Hawari et al., 2023). PBNU dan PP Muhammadiyah sepakat menolak politik identitas yang dianggap berbahaya dan memecah belah masyarakat. Keduanya menekankan pentingnya politik rasional yang berbasis program dan visi, menghindari konflik antar identitas primordial NU dan Muhammadiyah menjadi pilar demokrasi dan masyarakat sipil, aktif memerangi radikalisme serta ekstremisme. Mereka mendirikan partai-partai seperti PKB (NU) dan PAN (Muhammadiyah), meskipun politik netral praktis, dan mendukung demokratisasi. Peran ini terlihat dalam Pilpres 2024, di mana keduanya mempengaruhi politik lokal sebagai kelompok kepentingan.

Masa Depan

Kedua organisasi kemasyarakatan Islam ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan pendidikan Islam. Keduanya memiliki visi yang sama, yaitu mencerdaskan umat dan menyiapkan generasi yang mampu merespons dinamika perubahan zaman dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Muhammadiyah menitikberatkan pendidikannya pada integrasi antara ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan umum yang diterapkan di sekolah maupun perguruan tinggi. Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) lebih menekankan perpaduan antara pendidikan agama dan pembekalan

keterampilan hidup yang berakar pada sistem pendidikan tradisional, khususnya pesantren. Walaupun memiliki pendekatan yang berbeda, Muhammadiyah dan NU sama-sama memiliki potensi besar dalam menghadapi tantangan era modern. Perbedaan tersebut justru bersifat saling melengkapi, di mana NU berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai tradisi keislaman yang mendalam, sedangkan Muhammadiyah berbagi pengalaman dalam pengelolaan pendidikan yang lebih modern dan terstruktur. Melalui kerja sama yang sinergis, keduanya dapat mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini. Dengan memperkuat kolaborasi, kedua organisasi Islam ini berpeluang meningkatkan perannya dalam sistem pendidikan nasional, baik melalui pengembangan kurikulum yang lebih menyeluruh maupun dengan membangun jejaring pendidikan yang saling mendukung. Upaya tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga melahirkan generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan pembentukan karakter moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam. (Malikhah et al., 2025)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa implikasi besar terhadap sistem pendidikan di

seluruh dunia, termasuk pendidikan Islam di Indonesia. Era digital, yang ditandai dengan masifnya penggunaan internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan sistem pembelajaran daring, telah merevolusi cara individu mengakses, mengelola, dan mentransmisikan pengetahuan. Dari perspektif sejarah sosial, pendidikan Islam pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi formal, tetapi juga berkembang sebagai ekosistem digital yang membentuk ulang relasi antara guru, murid, dan masyarakat. Dinamika tersebut dapat dianalisis melalui empat indikator utama: kebijakan negara, peran lembaga pendidikan, tantangan struktural, dan respons sosial. Dari sisi kebijakan negara, pemerintah telah merumuskan berbagai regulasi terkait digitalisasi pendidikan, seperti Merdeka Belajar dan transformasi digital madrasah yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Integrasi kurikulum berbasis digital serta penyediaan platform e-learning madrasah menunjukkan adanya pengakuan bahwa pendidikan Islam tidak dapat lagi dipisahkan dari teknologi. Kebijakan ini juga berorientasi pada literasi digital, keterampilan abad ke-21, dan kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam konteks peran lembaga pendidikan, madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi Islam kini memanfaatkan Learning Management System (LMS), aplikasi

berbasis Android, dan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Hal ini mencerminkan pergeseran fungsi lembaga pendidikan Islam dari sekadar ruang tatap muka fisik menjadi hybrid yang menggabungkan ruang fisik dan digital. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan akses dan fleksibilitas belajar; di sisi lain, ia memunculkan kesenjangan digital antarwilayah, terutama antara kota dan desa (Lestari Anggi; Supriyatno, Triyo, 2025). Kedua organisasi menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi, dengan strategi sinergi dakwah serta pendidikan modern. Muhammadiyah mengadopsi pembelajaran digital dan pelatihan teknologi, sementara NU menjaga pendidikan inklusif. Kontribusi Islam Indonesia moderat memastikan relevansi abadi bagi bangsa.

Prinsip Dasar dan Ideologi Ahlul Sunnah wal Jama'ah

Prinsip-prinsip ahlul sunnah wal Jama'ah juga sering disebut pilar-pilar utama sikap Aswaja dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, terutama yang dianut oleh Nahdlatul Ulama adalah

1. Tawassuth (Sikap Moderat atau Jalan Tengah)
2. Tawazzun (Sikap Seimbang)
3. Tasamuh (Sikap Toleran)
4. I'tidal (Sikap tegak/lurus)

5. Amar Ma'ruf nahi Munkar (Mengajak Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran)

Landasan ideologi Aswaja dapat dilihat dari rujukan yang digunakan dalam tiga aspek utama ajaran Islam:

1. Akidah (Tauhid/Keyakinan)

Akidah ini merupakan diri di antara Jabariyah dan Qodariyah/Mu'tazilah. Aswaja meyakini manusia memiliki usaha atau kehendak tetapi semua tindaknya berada di bawah kehendak Allah SWT

2. Fiqih (Hukum)

Dalam praktik ibadah dan muamalah, Aswaja mengajurkan untuk berpegangan pada salah satu dari 4 imam yaitu: Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali.

3. Tasawuf (Akhlak/Spiritual)

Dalam hal penyucian jiwa dan pengembangan spiritual, Aswaja mengikuti metode yang ditetapkan oleh Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali.

Kontribusi di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial

Selain dikenal dengan organisasi Islam yang besar, Muhammadiyah juga bergerak pada bidang-bidang kehidupan di masyarakat dan berperan aktif di dalamnya.

1. **Muhammadiyah pada Bidang**

Kesehatan. Program konsolidasi Muhammadiyah secara umum dapat dilihat dari bidang kesehatan dan kualitas hidup yaitu; Meningkatkan mutu pelayanan dan pelayanan rumah sakit umum, Rumah sakit bersalin, Balai pengobatan, dan Balai kesehatan ibu dan anak.

2. **Muhammadiyah pada Bidang**

Pendidikan. Bidang pendidikan merupakan sektor utama yang menjadi fokus gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya. Aktivitas pendidikan Muhammadiyah memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari pendidikan anak usia dini melalui Taman Kanak-kanak *Bustanul Athfal*, pondok pesantren, sekolah umum dan kejuruan, madrasah, hingga perguruan tinggi. Luasnya jangkauan tersebut menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Tujuan pendidikan Muhammadiyah hingga saat ini tetap mengacu pada *Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah*, yang diarahkan untuk membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Melalui lembaga-lembaga pendidikannya, Muhammadiyah berupaya membina peserta didik agar menjadi individu

yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat. Selain itu, pendidikan Muhammadiyah juga diarahkan untuk menyiapkan generasi penerus yang memiliki komitmen keislaman dan kebangsaan, serta mampu menjadi kader Muhammadiyah yang berperan aktif di masa mendatang.

3. **Muhammadiyah pada Bidang**

Sosial. Dalam ranah sosial, Ahmad Dahlan mengawali gerakan pembaruan Muhammadiyah dengan memberikan perhatian besar pada upaya penanggulangan kemiskinan. Organisasi ini mengembangkan berbagai bentuk kegiatan sosial yang diwujudkan melalui mekanisme amal, yang secara khusus ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut mencakup bantuan bagi fakir miskin, pembinaan dan pengasuhan anak yatim, serta pelaksanaan khitan massal sebagai bentuk kepedulian sosial untuk meringankan beban keluarga kurang mampu.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Muhammadiyah mendirikan berbagai Amal Usaha di bidang sosial. Beberapa di antaranya adalah panti asuhan yang telah berdiri sejak lama, seperti Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah (PAY) Yogyakarta, PAY Muhammadiyah Danukusumo

Banyu Urip Purworejo, serta Panti Asuhan Bapeliruzam Muhammadiyah Kendal.

Kontribusi dalam Transisi Demokrasi dan Penguatan Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan sebuah konsep peradaban yang dipandang ideal dalam kehidupan modern, mencakup penguatan sistem demokrasi, pelestarian nilai-nilai budaya, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Konsep ini lahir dan berkembang melalui pemikiran para intelektual dan cendekiawan yang berupaya menyesuaikannya dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun demikian, masyarakat Indonesia yang selama waktu cukup lama hidup di bawah dominasi rezim otoriter Orde Baru mengalami pembentukan pola pikir dan perilaku politik yang kaku, sehingga membutuhkan proses penataan ulang dalam perspektif kebangsaan sebelum mampu mengadopsi masyarakat madani sebagai paradigma baru secara menyeluruh. Sebagaimana dikemukakan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang dikenal sebagai penggagas istilah masyarakat madani, lahirnya kesadaran kritis masyarakat madani tidak dapat dilepaskan dari berbagai krisis yang dialami umat Islam, baik di kawasan Asia maupun Afrika. Krisis tersebut meliputi meningkatnya kekerasan, sikap ekstrem dan

intoleran, kemiskinan dan keterbelakangan, ketidakadilan serta degradasi sosial, melemahnya tradisi intelektual, hingga kemerosotan budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat seakan terjebak dalam penindasan akibat praktik kekuasaan yang bersifat diktator. Secara konseptual, masyarakat madani memiliki kedekatan dengan gagasan masyarakat sipil, terutama dalam hal penekanan pada demokrasi dan kedaulatan rakyat. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan; konsep masyarakat sipil lebih sering dibahas dalam kerangka politik, sementara masyarakat madani memiliki dimensi religius yang lebih kuat. Masyarakat madani adalah terwujudnya keseimbangan peran antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Negara berfungsi menjamin keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, serta menyediakan pelayanan publik yang adil dan merata. Pasar berperan sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, namun tetap berada dalam pengawasan negara agar tidak menimbulkan praktik ketidakadilan dan eksploitasi. Di sisi lain, masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan inisiatif warga memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan aktivitas pasar, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mendorong partisipasi politik dan sosial yang lebih luas. Secara konseptual, proses

transisi menuju demokrasi dapat dipahami melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah pelepasan diri dari sistem pemerintahan yang bersifat otoriter, sedangkan tahap kedua adalah upaya membangun tatanan konstitusi yang demokratis. Apabila kekuatan represif dari rezim sebelumnya masih bertahan selama masa transisi, maka perubahan yang terjadi cenderung berhenti pada tahap awal. Sebaliknya, apabila lembaga-lembaga represif tersebut berhasil dilemahkan atau dibubarkan, maka proses transisi dapat berlanjut ke tahap pembentukan sistem demokrasi yang lebih mapan. Agar transisi demokrasi dapat berlangsung secara bersamaan dan berkelanjutan, terdapat tiga prasyarat utama yang perlu dipenuhi, yaitu: Pertama, sejumlah aktor reformis yang berada di dalam pemerintahan perlu mampu membangun kesepakatan dan kerja sama dengan kelompok oposisi yang bersikap moderat. Kedua, para reformis dituntut untuk meyakinkan pihak militer agar bersedia mendukung serta terlibat dalam upaya perubahan kelembagaan yang lebih demokratis. Ketiga, kelompok-kelompok moderat tersebut harus memiliki dukungan dari sekutu-sekutu internal yang sejalan dengan agenda reformasi.

Sementara itu, civil society sebagai gambaran *the good society* dapat dipahami sebagai terwujudnya nilai dan norma yang luhur dalam perilaku lembaga-lembaga

sosial maupun institusi pemerintahan. Robert Putnam memaknai civil society tidak sekadar sebagai struktur sosial, melainkan sebagai kumpulan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, kehidupan yang bersifat asosiatif mampu menumbuhkan dan menjamin keberlangsungan nilai-nilai serta norma-norma tertentu, yang selanjutnya membentuk hubungan erat antara norma tersebut dengan tujuan utama dari masyarakat sipil itu sendiri. Civil society sebagai gambaran *the good society* dapat dipahami sebagai kondisi ketika nilai-nilai dan norma-norma positif tercermin dalam perilaku lembaga-lembaga sosial maupun institusi pemerintahan. Dalam pandangan Robert Putnam, konsep civil society tidak hanya merujuk pada struktur masyarakat, tetapi juga pada seperangkat nilai dan norma yang hidup dan berkembang di dalamnya. Ia menekankan bahwa kehidupan yang bersifat asosiatif mampu menjaga keberlangsungan nilai-nilai dan norma tertentu, yang selanjutnya membentuk keterkaitan antara norma tersebut dengan tujuan utama dari keberadaan masyarakat sipil. Kontribusi masyarakat sipil dalam transisi demokrasi Indonesia sangat penting dan beragam. Setelah jatuhnya rezim otoriter pada 1998, berbagai organisasi masyarakat sipil aktif mengadvokasi reformasi demokrasi, memobilisasi dukungan publik, dan

menekan pemerintah agar melakukan perubahan. Mereka memainkan peran utama dalam mengorganisasi protes damai serta demonstrasi yang menuntut kebebasan politik dan penghormatan hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat sipil juga berfungsi sebagai pengawas pemerintah, mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Transformasi Internal dan Isu Kepemimpinan (Regenerasi dan Modernisasi)

Menguatnya peran lembaga perwakilan rakyat atau parlemen bermula dari runtuhnya kekuasaan absolut raja-raja. Gagasan ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik kekuasaan kaum bangsawan yang sewenang-wenang, serakah, dan mengabaikan hak-hak rakyat. Ketidakpuasan tersebut kemudian mencapai puncaknya dalam Revolusi Prancis, yang didorong oleh pemikiran bahwa setiap manusia memiliki kedudukan dan martabat yang setara. Pasca terjadinya revolusi tersebut, berkembang konsep demokrasi langsung, yakni suatu sistem yang menempatkan warga negara sebagai subjek utama dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara dipandang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Seiring dengan

perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kehidupan bernegara, demokrasi mengalami penyesuaian dalam praktiknya. Dalam konteks demokrasi modern, partai politik memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Keberadaan partai politik berfungsi sebagai sarana penyalur dan penghubung aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Partai politik menjadi media bagi warga negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya serta menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan negara. Tanpa adanya partai politik, pelaksanaan demokrasi yang aspiratif akan sulit terwujud, mengingat luasnya wilayah negara, besarnya jumlah penduduk, serta kompleksitas urusan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Schattschneider yang menegaskan bahwa demokrasi dibentuk oleh partai politik, bukan sebaliknya. Modernisasi mencakup pembaruan struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta penerapan teknologi informasi untuk memperkuat komunikasi dan partisipasi anggota partai. Selain itu, modernisasi juga melibatkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan membuka ruang bagi kader-kader muda untuk mengambil peran kepemimpinan baru. Isu kepemimpinan terkait regenerasi dan modernisasi dalam partai politik Indonesia

sangat krusial untuk menjaga dinamika dan relevansi partai di era demokrasi masa kini. Regenerasi tidak hanya bermakna pergantian usia kader, tetapi lebih jauh mencakup pembaruan cara berpikir, metode kampanye, dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakter pemilih muda yang kritis dan menginginkan perubahan nyata. Partai politik didorong untuk membuka ruang seleksi yang transparan dan memberi kesempatan kader muda memimpin wilayah strategis serta maju dalam kontestasi politik penting, bukan sekadar menjadi pelengkap.

Kesimpulan

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dua kekuatan utama dalam sejarah modernitas Islam Indonesia yang berperan besar dalam pembaruan pemikiran, pendidikan, sosial, dan kehidupan kebangsaan. Keduanya lahir dari konteks sejarah yang berbeda. Muhammadiyah sebagai gerakan modernis berbasis purifikasi dan tajdid, sedangkan NU sebagai gerakan tradisionalis yang menjaga tradisi Ahlul-sunnah wal Jamaah, namun keduanya memiliki tujuan yang sama: memajukan umat dan menjaga keutuhan bangsa. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, baik Muhammadiyah maupun NU menunjukkan kontribusi penting. NU melalui Resolusi Jihad 1945 mendorong perjuangan fisik mempertahankan

kemerdekaan, sedangkan Muhammadiyah membangun kekuatan nasionalisme melalui pendidikan modern, kaderisasi, dan jaringan amal usaha. Pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, keduanya memiliki dinamika hubungan yang berbeda dengan negara, namun tetap konsisten membawa nilai Islam moderat, toleran, dan kebangsaan.

Referensi

- Fyroza Mustika Akhlis. (2024). Ideologi Muhammadiyah. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 43–48. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.483>
- Hasballah, J., & Suyanta, S. (2025). Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 70–80. <https://doi.org/10.62710/09n4b627>
- Hawari, A. Y., Suwaryo, U., & Kartini, D. S. (2023). Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>
- Ilham, M., Rusdi, F., & Hasaniyah, N. (2024). *GERAKAN*

PEMBAHARUAN ISLAM PRA
DAN PASCA KEMERDEKAAN
INDONESIA: Gerakan dan Pemikiran
Nahdlatul Ulama ' (NU). 6(1), 1–7.

ndex.php/tadribunajournals/article/vi
ew/161/135

Lestari Anggi; Supriyatno, Triyo, A. dwi; A.
(2025). Pendidikan Islam dan
Dinamika Sosial: Studi Komparatif
Masa Demokrasi Parlementer dan Era
Digital. *Peradaban Journal of
Interdisciplinary Educational Research*, Vol.
3 No. 2 (2025), 142–153.
[http://jurnal.peradabanpublishing.co
m/index.php/PJIER/article/view/53
2/166](http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJIER/article/view/532/166)

M. Ali Imron, M. Fadhil Akbar, Nurul
Fitria, & Agus Rifki Ridwan. (2024).
Korelasi Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah. *Tabsyir: Jurnal
Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 6(1),
170–186.
[https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1
.1904](https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1904)

Malikhah, S. M., Aripin, S., & Ulama, N.
(2025). KOLABORASI DUA
ORMAS ISLAM DALAM
PENGUATAN. 4(4), 7510–7516.

Yola, S. A. N. (2024). Peran Muhammadyah
dan Nahdlatul Ulama dalam
Perjuangan Merebut Kemerdekaan
Indonesia. *TADRIBUNA*, Vol 4 No 2
(2024): Januari-Juni, 87–92.
<https://journal.stithidayatullah.ac.id/i>